

# PENDIDIKAN BAHASA ASING DAN PROSPEKNYA DALAM DUNIA PARIWISATA

Oleh: Rohali

## ABSTRAK

*Sesungguhnya usaha pariwisata memang dapat dikatakan sebagai kegiatan industri. Berbeda dengan kegiatan industri lainnya, industri pariwisata menjual barang ditempat dan tidak mengirimkan barang tersebut ke luar. Pembeli datang sendiri dan membelanjakan uangnya. Industri pariwisata juga tidak dibatasi dengan kuota dan standar mutu barang dengan ketentuan tarif yang ketat. Dipihak lain industri ini juga melibatkan banyak orang di dalamnya, mulai dari seniman, tenaga kerja terampil, tenaga kerja terdidik, perhotelan, transportasi dan lain-lain. Belum lagi kebutuhan akan biro-biro perjalanan dan toko-toko seni yang membutuhkan banyak pemandu wisata dan pelayanan jasa lainnya. Semua itu memerlukan tenaga kerja yang profesional. Profesionalisme itu tidak hanya dari skill (penguasaan bidang pekerjaan) yang mereka miliki akan tetapi juga penguasaan bahasa asing yang memadai.*

*Peluang yang demikian luas tersebut tentu saja sangat menggembirakan bagi lulusan jurusan pendidikan bahasa asing khususnya dan IKIP pada umumnya (terutama yang ada di Yogyakarta) untuk meniti karir di bidang pariwisata. Oleh karenanya menjadi tugas IKIP (jurusan bahasa asing) untuk membekali mahasiswanya dengan kompetensi lain, terutama kompetensi kepariwisataan di samping kompetensi kependidikan. Kompetensi kepariwisataan tersebut dapat dijadikan sebagai unggulan komparatif yang tidak dimiliki oleh jurusan dan perguruan tinggi lain.*

*Dalam upaya memperoleh kompetensi kepariwisataan tersebut perlu kiranya dilakukan pengembangan kurikulum yang memperhatikan konsep link and match atau kesesuaian antara*



*kurikulum dengan kenyataan lapangan kerja yang tersedia. Disamping itu optimalisasi muatan lokal harus terus ditingkatkan dengan melakukan pendekatan link and match tersebut.*

## 1. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi, terutama sejak berakhirnya perang dunia II membawa dampak sosial budaya yang amat besar di seluruh penjuru dunia. Perkembangan teknologi di bidang komunikasi, tidak hanya mempermudah orang berhubungan dari jarak yang jauh dan menyebar luaskan informasi ke seluruh pelosok dunia dengan cepat dan mudah, akan tetapi juga merangsang pemikiran baru dan kegiatan sosial yang lebih besar skalanya di seluruh masyarakat dunia.

Kemajuan teknologi di bidang transportasi juga tidak kalah pentingnya dalam proses perkembangan kebudayaan antar bangsa. Jika sarana komunikasi telah mampu menyebarluaskan informasi ke seluruh pelosok dunia, maka sarana transportasi mampu menyebarluaskan kebudayaan itu (difusi) di dunia. Dengan sarana transportasi, orang dapat bepergian ke seluruh penjuru dunia tanpa mengenal batas lingkungan sosial budaya, politik, maupun geografi.

Banyak negara telah menempatkan pariwisata sebagai sektor andalan dalam memperoleh devisa negara, termasuk juga Indonesia. Pengembangan sektor pariwisata Indonesia ini didasarkan atas kenyataan bahwa industri pariwisata tidak mengenal *kuota* dan standar mutu barang dengan ketentuan tarif yang ketat, sehingga memungkinkan industri ini dapat dikembangkan semaksimal mungkin. Industri ini juga banyak memerlukan tenaga kerja profesional untuk mengisi pos-pos pekerjaan yang ada. Profesionalisme tersebut tidak hanya menyangkut *skill* (penguasaan bidang pekerjaan tertentu) akan tetapi juga menyangkut kemampuan bahasa asing. Hal tersebut dikarenakan industri pariwisata adalah industri jasa yang berhubungan dengan orang lain (asing).

Melihat demikian terbentang luasnya kesempatan untuk meniti karir di bidang pariwisata ini, suatu hal yang menggembirakan bagi lulusan dan calon lulusan pendidikan bahasa asing untuk menekuninya. Untuk itu perlu kiranya IKIP, khususnya jurusan pendidikan bahasa asing memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan sebagai bekal bagi mahasiswa terjun dalam bidang pariwisata.



## 2. PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA

Sesungguhnya gerakan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain merupakan suatu kegiatan sosial yang sama tuanya dengan peradaban manusia itu sendiri. Sejarah perkembangan manusia di muka bumi ini ditandai dengan mobilitas penduduk yang terdorong oleh rasa ingin tahu (*curiosité*) dan mencari pengalaman baru (*expérience*). Akan tetapi perjalanan yang terorganisir secara rapi dan jelas arah dan tujuannya sebagai pariwisata baru berkembang setelah revolusi industri di Inggris yang ditandai dengan urbanisasi secara besar besaran. Hal ini dapat dimengerti karena perjalanan wisata hanya dapat dilakukan oleh mereka yang mampu menyisihkan sebagian waktu dan penghasilannya untuk pembiayaan perjalanan tersebut. Mereka biasanya berasal dari golongan industri yaitu golongan menengah ke atas. Perjalanan wisata tersebut didukung pula oleh kemajuan teknologi khususnya di bidang komunikasi dan transportasi.

Sekarang ini kegiatan pariwisata bukan hanya milik negara-negara maju. Hampir semua negara telah menempatkan sektor pariwisata menjadi sektor andalan dalam meraih devisa negara. Daya tarik wisata yang mula-mula berada pada daerah perkotaan yang kosmopolitan sekarang telah bergeser pada daya tarik wisata budaya dan keindahan alam yang dikenal dengan lima *S* yaitu *sun*, *sea*, *sand*, *sky*, dan *smille*, yang justru banyak di negara-negara berkembang.

Di Indonesia kesadaran akan pentingnya sektor wisata baru muncul sekitar tahun 1978-an. Kesadaran akan pentingnya komoditi nonmigas ini semakin terasa ketika dunia dilanda resesi dunia tahun 1982 yang implikasinya juga melemahkan perekonomian Indonesia (Raharjo, 1990: 1).

Mengingat sektor migas tidak lagi dapat dijadikan sandaran penyangga devisa negara, presiden Suharto mencanangkan pariwisata sebagai penghasil devisa nomor dua setelah migas (Sutomo, 1990 : 1). Bahkan dalam GBHN telah ditegaskan bahwa pembangunan kepariwisataan menjadi sektor andalan yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi termasuk kegiatan sektor lain yang terkait, sehingga lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah, serta pendapatan negara dan penerimaan devisa meningkat melalui upaya pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan nasional (GBHN 1993).

Pada repelita IV dan repelita V target pencapaian devisa melalui sektor pariwisata menunjukkan kenaikan tajam. Tahun 1994 sektor ini menduduki tempat ketiga sebagai penyumbang devisa dengan 4.964.000 US\$ atau 14,05 %



dari total penerimaan devisa, berada di bawah industri tekstil dengan 5.641.294 US\$, dan industri pengolahan kayu dengan 5.632.516 US\$ (*Kompas 29 Juni 1995 : 2*). Hal ini sangat logis karena jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia terus meningkat. Berdasarkan data statistik laporan tahunan PDBI tahun 1995 diketahui jumlah wisatawan dunia yang berkunjung ke Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup tajam. tabel berikut menunjukkan pangsa pasar Indonesia dalam pariwisata global tahun 1969-1994.

Pangsa Pasar Indonesia dalam Pariwisata 1969-1994

Tahun	Jumlah Wisatawan		Pangsa RI (%)	Devisa US\$ juta dolar		Pangsa RI (%)
	Indonesia	Dunia		Indonesia	Dunia	
1969	86.100	143.511.000	0,06	10,8	16,800	0,06
1973	270.303	198.906.000	0,14	40,9	31,054	0,13
1978	468.614	267.076.000	0,18	94,3	68,845	0,14
1983	638.855	292.739.000	0,22	439,5	100,596	0,44
1988	1.301.049	401.971.000	0,32	1.027,8	199,282	0,52
1993	3.403.138	500.142.000	0,68	3.987,6	326,035	1,22
1994	4.006.312	528.400.000	0,76	4.694,0	321,000	1,47

(*Kompas 29 Juni 1995: 2*, dari PDBI 1995)

Industri pariwisata merupakan industri yang berorientasi pada penjualan jasa dengan jasa-jasa wisata sebagai produknya. Pengertian produk wisata itu sendiri menurut Yoeti (1985 : 14) adalah semua jasa-jasa (service) yang dibutuhkan wisatawan semenjak ia berangkat meninggalkan tempat kediamannya sampai kembali ke rumah di mana ia tinggal. Jadi produk industri wisata merupakan suatu “paket” yang saling terkait dan tak terpisahkan antara jasa-jasa wisata yang membentuk sub-sub sistem yang ada di dalamnya. Oleh karena itu faktor manusia menjadi sangat penting peranannya dalam industri ini. Berhasil tidaknya pengelolaan industri wisata tergantung pada kesiapan dan profesionalisme sumber daya manusia pendukungnya.



Jadi jelaslah bahwa kegiatan pariwisata merupakan mata rantai kegiatan yang sangat panjang, mulai dari kegiatan biro perjalanan, pengangkutan, perhotelan, restoran, kegiatan pemandu wisata, kerajinan rakyat, pemeliharaan, dan pengembangan objek wisata, kesenian daerah, dan seterusnya. Sebagai implikasi dari kegiatan yang panjang tersebut, sektor pariwisata membawa dampak yang sangat luas bagi pengembangan kesempatan kerja di Indonesia.

Walaupun pengembangan kepariwisataan di Indonesia berorientasi pada pemerolehan devisa, pengembangan sektor pariwisata ini tidak boleh melupakan aspek kepribadian bangsa Indonesia. Maksudnya adalah, dalam mengembangkan sektor pariwisata jangan sampai merusak budaya dan kepribadian bangsa, bahkan harus memperkuatnya. Garis- Garis Besar Haluan Negara 1993 menegaskan bahwa pengembangan pariwisata nusantara dilaksanakan sejalan dengan upaya memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa, serta menanamkan jiwa, semangat, dan nilai-nilai luhur bangsa dalam rangka lebih memperkuat persatuan dan kesatuan nasional.... harus tetap menjaga nilai-nilai agama, citra kepribadian bangsa, serta harkat dan martabat bangsa (GBHN 1993, Bahan Penataran Pola 100 Jam Th. 1993 : 114). Hal ini berarti bahwa dalam pengembangan kepariwisataan harus memperhatikan dan bersumber pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

Dengan kata lain, pengembangan pariwisata Indonesia harus benar-benar memperhatikan aspek kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karenanya tenaga kerja yang bergerak di sektor ini haruslah mereka yang memiliki semangat kebangsaan yang tinggi, menjunjung harkat dan martabat bangsa, serta memiliki pendidikan yang cukup.

### **3. PROSPEK LULUSAN PENDIDIKAN BAHASA ASING**

Dewasa ini banyak keluhan dilontarkan masyarakat berkaitan dengan semakin sempitnya lapangan pekerjaan bagi lulusan pendidikan terutama perguruan tinggi kependidikan. Dari tahun ke tahun tenaga kerja yang tidak dapat tertampung dalam lapangan kerja semakin besar. Menurut catatan Badan Pusat Statistik, Pada pelita V (tahun 1988 - 1993) jumlah lulusan perguruan tinggi kependidikan (LPTK) sebesar 260.537 orang sedangkan yang dibutuhkan dalam lapangan kerja hanya 172.143 yang berarti ada selisih 88.394 orang yang tidak mendapat pekerjaan ( Djohar 1991 : 3 ). 52,8 % dari pencari kerja tersebut berusia antara 21 - 25 tahun dan 14,5 % nya berusia antara 26 - 30 tahun



(Mahon dalam Dhohar 1991 : 3). Data tersebut mengisyaratkan bahwa jumlah pencari kerja yang tidak tertampung adalah mereka yang berada pada usia produktif (21 - 30 tahun) yang berarti pula lapangan pekerjaan bagi lulusan LPTK (pada usia produktif) semakin sempit dan tidak seimbang dengan jumlah lulusan yang semakin besar. Oleh karenanya unggulan komparatif memang benar-benar harus disiapkan pada semua lulusan pendidikan agar mereka dapat berkompetisi menghadapi masa depannya.

Untuk mengantisipasi semakin membengkaknya pengangguran terdidik khususnya lulusan tenaga kependidikan perlu kiranya dicari alternatif pemecahannya. Salah satu solusi yang menjanjikan adalah dunia pariwisata. Sektor ini banyak memerlukan tenaga kerja, baik tenaga kerja yang langsung berkaitan dengan pelayanan kepada wisatawan ataupun yang tidak langsung. Banyak pos-pos pekerjaan dalam industri pariwisata ini yang dapat diisi oleh lulusan pendidikan bahasa asing seperti jasa-jasa biro perjalanan (ticketing, tour operator, pemandu wisata), maupun jasa-jasa perhotelan. menurut data Direktorat Jendral Pariwisata tahun 1989, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan di sektor pariwisata mencapai 11,9 juta orang dengan target per tahunnya mencapai 2,38 juta orang (Budhisantoso 1992 : 26).

Selain itu kebutuhan akan tenaga pramuwisata pun semakin besar, sejalan dengan terus meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Tahun 1991 jumlah pramuwisata yang berlisensi baru sekitar 319 orang, dibandingkan dengan jumlah wisatawan yang datang pada tahun tersebut yaitu 2.570.000 orang. Kebutuhan akan tenaga terampil lainnya adalah di bidang perhotelan. menurut IUOTO (International Union of Official Travel Organisation) setidaknya diperlukan 750.000 orang per tahunnya untuk bekerja di bidang perhotelan dan restoran sejalan dengan peningkatan jumlah hotel dan restoran.

Peningkatan pertumbuhan jaringan perhotelan yang semakin pesat membawa konsekuensi penyediaan tenaga kerja terampil yang cukup. Pada tahun 1995-1997 diproyeksikan adanya penambahan 225 hotel baru (khusus bintang tiga ke atas) dengan kapasitas 48.000 kamar, sehingga di tahun 1997/1998 akan beroperasi 462 hotel dengan kapasitas 88.000 kamar (Kompas 29 Juni 1995:2).

Secara umum bidang-bidang pekerjaan yang berkaitan dengan dunia kepariwisataan dapat disebut sebagai berikut.

1. Jasa-jasa *travel agent* untuk mengurus dokumen perjalanan wisatawan
2. Jasa-jasa biro perjalanan dan *tour operator*
3. Jasa-jasa transportasi (taxi, penerbangan, penyeberangan, dan lain-lain)



4. Jasa-jasa perhotelan dan penginapan di tempat yang ia kunjungi
5. Jasa-jasa pemandu perjalanan wisata
6. Jasa-jasa toko seni (art shop) yang menjual cendera mata bagi wisatawan
7. Jasa-jasa pertokoan yang menjual berbagai kebutuhan wisatawan
8. Jasa-jasa *entertainment* sebagai tempat hiburan bagi para wisatawan
9. Jasa-jasa komunikasi (telepone, faximile, dan sebagainya).

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kesempatan bagi lulusan pendidikan bahasa asing untuk berkarya di bidang pariwisata amatlah terbuka luas. Masalahnya adalah mereka tidak memiliki kompetensi yang diperlukan dalam dunia pariwisata selain kompetensi kependidikan dan penguasaan bahasa asing. Oleh karenanya, sudah selayaknya jika para lulusan pendidikan bahasa asing memiliki keunggulan komparatif agar mereka dapat berkompetisi dalam meraih peluang kerja tersebut

#### **4. PENGEMBANGAN KURIKULUM**

Telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa untuk dapat berkompetisi merebut peluang kerja di bidang pariwisata, lulusan IKIP (jurusan bahasa asing) harus memiliki kompetensi kepariwisataan disamping kompetensi kependidikan dan kebahasaan yang mereka pelajari. Oleh karena itu pengembangan kurikulum pada jurusan pendidikan bahasa asing di IKIP atau LPTK sudah mendesak untuk dilakukan

##### **4.1 Pengertian Kurikulum**

Sebelum dibicarakan mengenai pengembangan kurikulum perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian kurikulum tersebut. Kata kurikulum berasal dari bahasa latin *curricula* yang arti semula adalah jalan untuk pedati atau perlombaan (Kaber, 1988: 3). Kemudian istilah ini dipakai dalam dunia pendidikan menjadi jalan atau cara untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengertian ini terus berkembang sejalan dengan perkembangan dunia pendidikan.

Menurut Gagne (dalam Kaber, 1988: 4) kurikulum merupakan suatu rangkaian unit bahan yang disusun sedemikian rupa sehingga setiap unit dipelajari secara utuh, dengan syarat kecakapan dan kemampuan yang terdapat dalam tujuan unit sebelumnya harus dikuasai oleh anak terlebih dahulu.

Pendapat senada dikemukakan oleh Oliva (dalam Kaber, 1988: 5). Menurut Oliva kurikulum merupakan suatu rencana atau program untuk semua



pengalaman yang dihadapi anak di bawah pengarahan sekolah. Pendapat Gagne dan Oliva tersebut mengisyaratkan bahwa kurikulum mengandung pengertian sebagai berikut

1. Kurikulum merupakan rangkaian unit pelajaran
2. Setiap unit pelajaran dipelajari secara utuh,
3. Ada prerekuisit terhadap setiap pelajaran, dan
4. Yang dipelajari oleh siswa adalah semua bentuk pengalaman belajar,
5. Sekolah mengarahkan tujuan pengajaran tersebut.

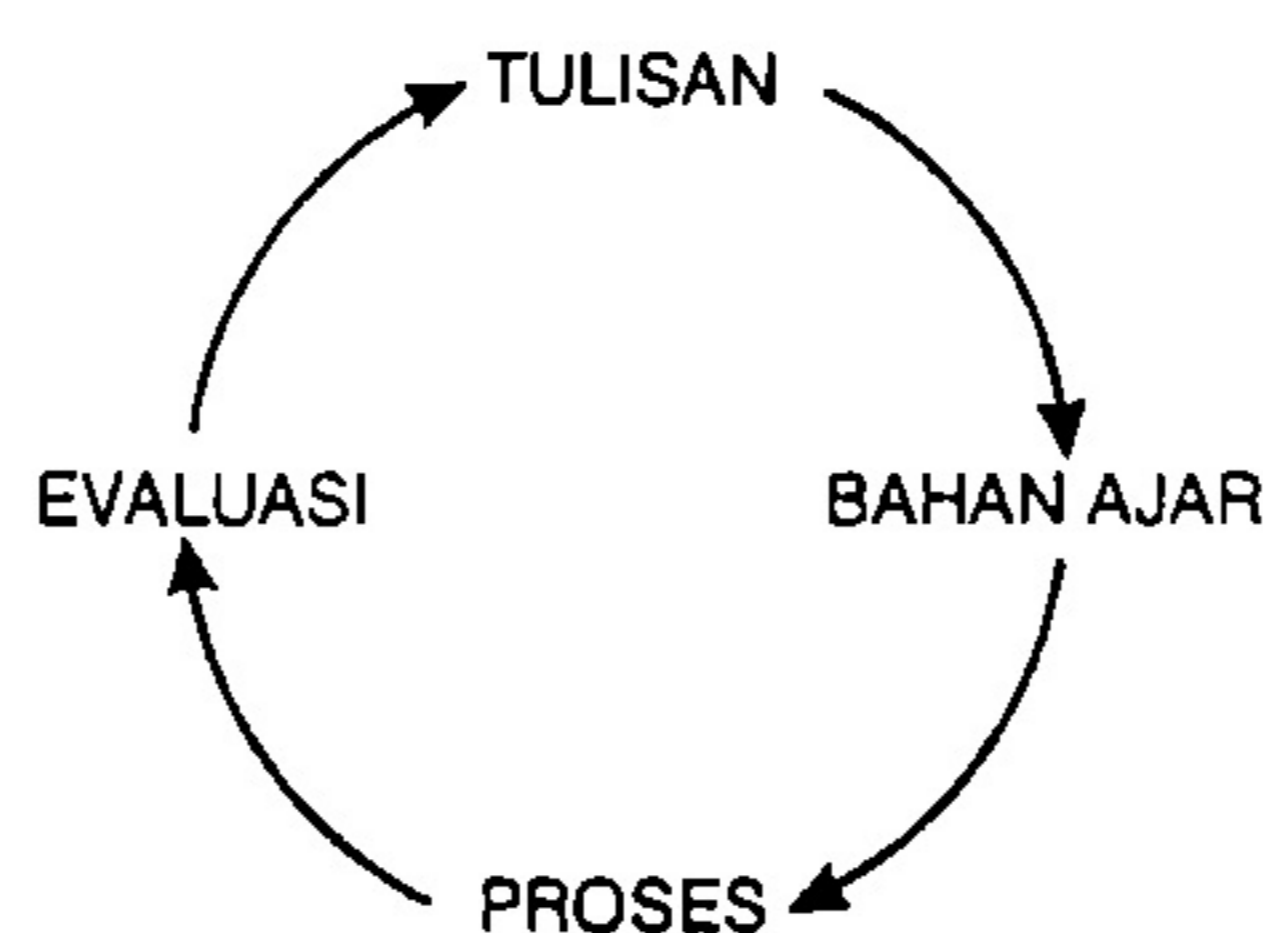
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan pedoman umum yang memberikan arahan dalam proses pengajaran, yang setiap pelajaran memiliki prerekuisit terhadap pelajaran atau pengalaman lainnya dan dipelajari secara utuh disekolah agar tujuan pengajaran tersebut dapat tercapai.

#### 4.2 Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum merupakan bagian yang sangat penting dalam program pengajaran. Hal ini bukan saja karena kurikulum menjadi acuan dalam program pengajaran akan tetapi juga bagaimana kurikulum tersebut di susun, siapa yang dilibatkan, apa tujuannya, dan apa isu-isu mutakhir yang berkenaan dengan kurikulum tersebut. Pengembangan kurikulum tidak berarti perubahan total terhadap kurikulum yang telah ada, akan tetapi perubahan yang dilakukan masih memperhitungkan atau melihat relevansi kurikulum lama sehingga antara kurikulum baru dengan kurikulum lama terjadi kesinambungan.

Para ahli berpendapat bahwa pengembangan kurikulum merupakan suatu siklus yang tak terpisahkan antara komponen-komponen tujuan pengajaran, bahan ajar, proses pengajaran, dan evaluasi. Siklus pengembangan kurikulum tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. (Kaber, 1988: 76)

#### Siklus Pengembangan Kurikulum



(Kaber, 1988: 101)



Gambar di atas menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum merupakan suatu sistem yang komprehensif dan saling terkait. Sebagai suatu siklus, pengembangan kurikulum tidak lepas dari perencanaan sub-sub sistem yang ada di dalamnya yaitu perencanaan tujuan, perencanaan bahan, perencanaan kegiatan, dan perencanaan evaluasi. Perencanaan tersebut sangat penting dilakukan agar tujuan pengajaran dapat dicapai seperti yang diharapkan.

Agar hasil yang diharapkan dapat tercapai, setidaknya dalam penyusunan kurikulum memperhatikan tiga aspek pokok yaitu (1) feasibilitas, (2) fleksibilitas, dan (3) kesesuaian dan kemanfaatan. Yang dimaksud dengan aspek feasibilitas di sini adalah kemungkinan suatu program pengajaran dapat diterapkan dalam proses pengajaran, baik secara mikro maupun secara makro. Feasibilitas pelaksanaan secara mikro meliputi pelaksanaan pengajaran dikelas, sumber daya manusianya (dosen pengajar), sarana penunjang, biaya, dan lain-lain. Feasibilitas pelaksanaan secara makro meliputi kemungkinan kerjasama dengan pihak terkait seperti dalam hal perijinan, praktik lapangan, dan lain-lain.

Aspek kedua adalah fleksibilitas. Yang dimaksud dengan fleksibilitas di sini adalah fleksibilitas dari segi pelaksanaan, fleksibilitas dari segi mahasiswa, dan fleksibilitas dari segi lulusan. Fleksibilitas dari segi pelaksanaan dimaksudkan bahwa tiap-tiap LPTK (jurusan) bebas mengembangkan sendiri satu konsentrasi keahlian yang berbeda yang disesuaikan dengan daerah geografis di mana perguruan tinggi (LPTK) itu berada. Menurut kurikulum FPBS tahun 1992 (1994: 2) tiap-tiap LPTK bebas mengembangkan kurikulum yang akan digunakannya sejauh tidak lepas dari segi pertanggungjawaban terhadap kelayakan serta keterpakaian lulusannya. Dalam hal ini, fleksibilitas pelaksanaan meliputi pula fleksibilitas konsentrasi mata kuliah dan muatan mata kuliah tersebut (materi) sesuai dengan daerah geografis LPTK tersebut. Misalnya jurusan bahasa asing yang berada di Yogyakarta dapat mengembangkan muatan kurikulumnya (muatan lokalnya) dengan pariwisata budaya, sehingga konsentrasi muatan kurikulumnya mengarah pada aspek wisata budaya. Demikian pula LPTK yang ada di daerah timur Indonesia dapat mengembangkan kurikulum dengan konsentrasi pada pariwisata alam karena terkenal dengan keindahan alamnya.

Fleksibilitas dari segi mahasiswa dimaksudkan agar mahasiswa dapat memilih berbagai ramuan program, baik berdasarkan kemampuan dan minatnya, maupun berdasarkan kebutuhannya (IKIP Yogyakarta, 1994: 2). Oleh karenanya



program yang ditawarkan harus lebih bervariasi dilihat dari kebutuhan dan minat mahasiswa. Dalam hal ini ramuan program yang ditawarkan hendaknya merupakan paket yang saling mendukung untuk membentuk kompetensi *kepariwisataan*, misalnya kepariwisataan umum, pemandu wisata, perhotelan, manajemen dan administrasi biro perjalanan, kesekretarian, dan sebagainya.

Fleksibilitas ketiga adalah fleksibilitas dari segi lulusan. Yang dimaksud dengan fleksibilitas lulusan ini adalah mereka dapat memiliki kemampuan yang lebih luwes, yaitu keluwesan dalam pengembangan kompetensi yang dimilikinya. Dengan keluwesan kompetensi tersebut mereka dapat menentukan apakah akan berkonsentrasi pada kompetensi kependidikan (yang nantinya akan menjadi pendidik) atau berkonsentrasi pada kompetensi kepariwisataan (yang nantinya akan bekerja pada sektor pariwisata).

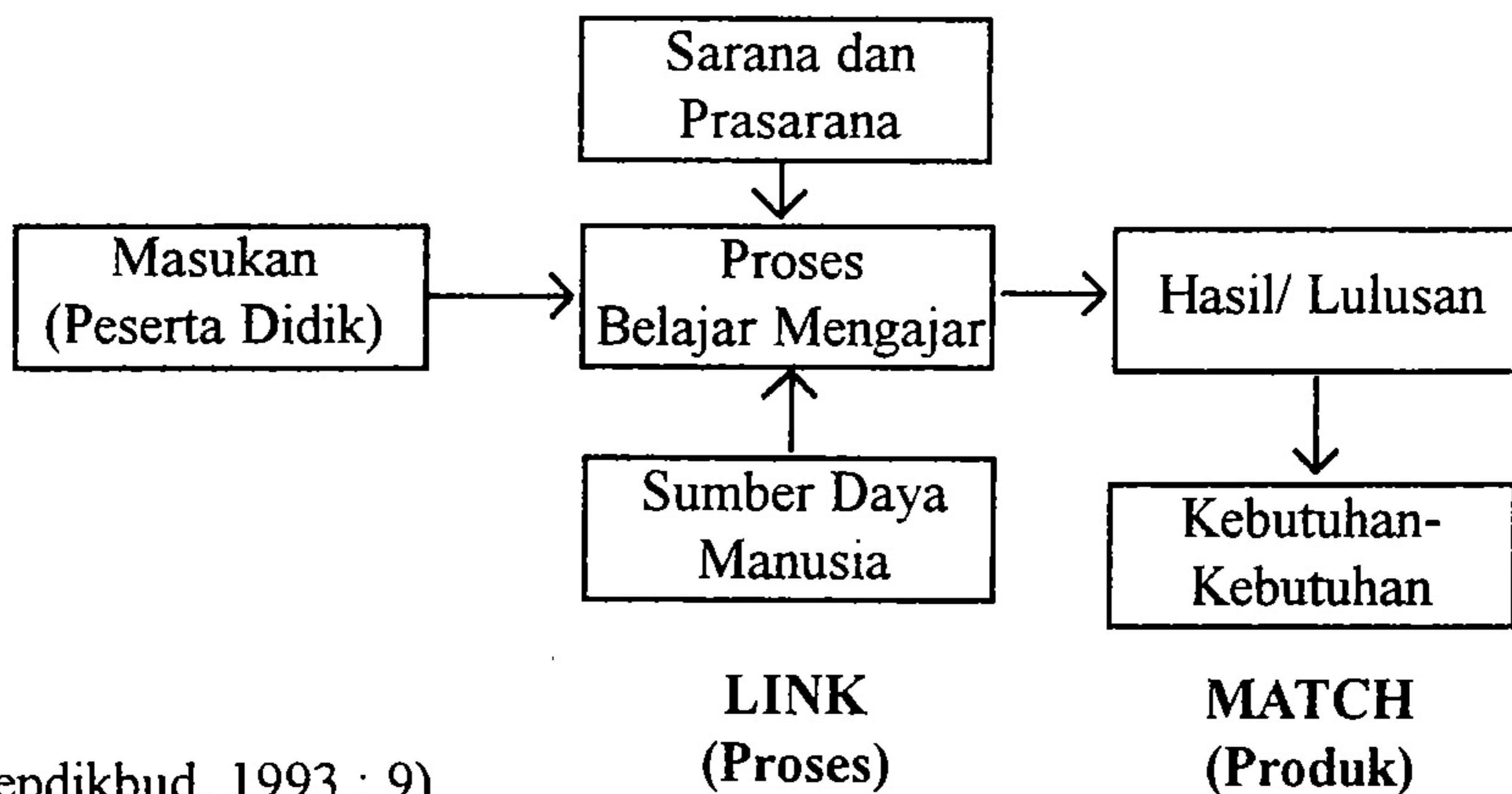
Aspek ketiga yang harus diperhatikan dalam penyusunan adalah kesesuaian dan kemanfaatan. yang dimaksud dengan aspek ketiga ini adalah dalam penyusunan kurikulum harus memperhatikan kesesuaian atau relevansi antara muatan kurikulum dengan kebutuhan tenaga kerja sehingga kurikulum yang dimiliki selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat. Muatan kurikulum harus benar-benar bermanfaat bagi mahasiswa setelah mereka lulus. Dalam hal ini kejelian dalam melihat kebutuhan kerja di masyarakat sangat penting dan menentukan relevansi yang dimaksud.

## **5. Link and Match**

Agar lulusan pendidikan bahasa asing memiliki daya saing yang tinggi, maka setidaknya harus ada pengembangan kurikulumnya. Pengembangan tersebut bertujuan agar kurikulum yang digunakan selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat (dunia kerja). Salah satu cara yang banyak digunakan dalam menjaga kesesuaian antara kurikulum dengan kebutuhan masyarakat (dunia kerja) adalah dengan pendekatan *link and match*.

*Link and Match* dimaksudkan sebagai pertautan, keterkaitan, atau hubungan interaktif antara proses dengan kebutuhan pembangunan sehingga produknya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan tersebut baik dari segi jumlah, mutu, jenis, kualifikasi, maupun dari segi waktunya (Depdikbud 1993 : 9). Perspektif *link and match* tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.





Berdasarkan gambar tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengembangan proses (PBM maupun, SDM, sarana dan prasarana, termasuk kurikulum di dalamnya) harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat, agar produk atau lulusan pendidikan tersebut dapat cocok dengan lapangan kerja yang tersedia. Hal ini tidak berarti bahwa pendidikan hanya berorientasi pada kebutuhan masyarakat sesaat semata, akan tetapi juga dijadikan sebagai pijakan yang penting dalam hal perencanaan program pengajaran agar terjadi kecocokan (match) antara proses pengajaran tersebut dengan jumlah dan mutu lulusan serta terhadap kebutuhan dunia usaha.

Upaya pengembangan kurikulum pada jurusan pendidikan bahasa asing tersebut tidak perlu *total match* atau penyesuaian habis-habisan akan tetapi dapat ditempuh dengan cara memasukkan kompetensi “kepariwisataan” dimaksud ke dalam sebagai muatan lokal. Dalam kurikulum IKIP Yogyakarta tahun 1992, bobot muatan lokal ini berkisar antara 25-35 % atau separuh dari topik-topik inti atau kewenangan utama (IKIP Yogyakarta, 1994: 5). Jumlah prosentase tersebut cukup untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi *kepariwisataan* di samping kompetensi kependidikan yang mereka miliki. Jika kompetensi *kepariwisataan* tersebut dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum (dalam muatan lokal) dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh, maka kompetensi tersebut dapat dijadikan sebagai keunggulan komparatif yang dapat digunakan oleh mahasiswa dalam berkompetisi *merebut* peluang kerja.

## 5. SIMPULAN



Sekarang ini sektor pariwisata telah menjadi sektor andalan dalam meraih devisa. Hampir setiap negara menempatkan sektor pariwisata sebagai sektor yang penting. Hal ini wajar karena sektor pariwisata sebagai suatu industri tidak mengenal kuota dan pembatasan mutu barang secara ketat, sehingga industri ini dapat dikembangkan secara maksimal. Selain itu industri pariwisata merupakan industri yang padat karya. Industri ini melibatkan banyak orang di dalamnya, mulai dari seniman, perhotelan, transportasi, dan lain-lain.

Hal tersebut di atas tentu saja menggembirakan para lulusan pendidikan bahasa asing untuk terjun dalam bidang kepariwisataan. Oleh karena itu sudah menjadi tugas IKIP (jurusan bahasa asing) untuk melakukan pembenahan atau pengembangan kurikulumnya. Pengembangan kurikulum tersebut dimaksudkan agar kurikulum yang digunakan senantiasa sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja.

Dalam upaya membekali mahasiswa dengan kompetensi kepariwisataan yang nantinya dapat mereka gunakan dalam berkompetisi merebut lapangan kerja di bidang pariwisata, pengembangan kurikulum dilakukan dengan pendekatan *link and match*. Selain itu dalam mengembangkan kurikulum harus pula memperhatikan tiga aspek pokok yaitu (1) feasibilitas, (2) fleksibilitas, dan (3) kesesuaian dan kemanfaatan.